

Politik Identitas Gender dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Makassar

¹Andi Amirah Humairah Yakub, ²Sukri Tamma, ³Ariana Yunus

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Sulawesi Selatan

E-mail: amirahumairah@yahoo.com

Abstract

Identity politics in democracy continues to be a topic of discussion, particularly regarding issues related to gender, religion, language, race, and ethnicity. These factors are often studied in the context of political identity during election periods, such as during the 2020 election in the city of Makassar. , Fatmawati Rusdi is the only female contestant in the Makassar City Election and makes history for women in the government seat for the next five years. The purpose is to describe how gender identity politics became a strategy for winning the 2020 regional elections in Makassar City. The research method used is a qualitative descriptive research method with a literature study and observation approach. The research results explain the gender identity politics in the Makassar City election, where Fatmawati Rusdi became the first female deputy mayor in Makassar City, the only woman to compete in the Makassar City election, Fatmawati Rusdi applied direct communication (door-to-door) with the community instead of image building in the media. Conclusion from this research, the involvement of women in local elections happened almost throughout Indonesia, especially in the city of Makassar, starting with the 2020 local elections where a woman was elected as the Deputy Mayor of Makassar. To win, Fatmawati Rusdi used the right strategy to gain the support of the mothers of the taklim councils in the alleys, one of the female sports communities often cycling, which greatly helped in the approach of campaigning and delivering the programs to be done when in office.

Keywords: Identity Politics, Gender, Election, Political Strategy

Abstrak

Politik identitas dalam berdemokrasi terus bergulir sampai pada isu gender, agama, bahasa, tercantum ras serta etnis terus jadi bahan kajian dalam politik identitas dalam setiap memasuki masa pilkada, seperti dalam pilkada tahun 2020 di Kota Makassar, Fatmawati Rusdi merupakan satu-satunya calon wakil walikota perempuan di Pilkada kota Makassar dan membuat sejarah bagi kaum perempuan di kursi pemerintahan lima tahun ke depan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik identitas gender menjadi strategi dalam meraih kemenangan dalam pilkada tahun 2020 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur review dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan politik identitas gender dalam pilkada Kota Makassar, Fatmawati Rusdi berhasil menjadi sejarah sebagai wakil walikota pertama di Kota Makassar, menjadi perempuan satu-satunya yang ikut bertarung dipilkada Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menerapkan komunikasi langsung (door-to-door) dengan masyarakat dibandingkan harus pencitraan dimedia. Penelitian ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pilkada yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Kota Makassar, mulai pilkada tahun 2020 terpilih seorang perempuan yang menjabat sebagai wakil walikota Makassar, untuk meraih kemenangan Fatmawati Rusdi menggunakan strategi yang tepat sehingga

©Palita: Journal of Social Religion Research. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

mendapat dukungan ibu-ibu majelis taklim di lorong-lorong, komunitas olahraga perempuan salah satunya sering bersepeda, dan hal ini sangat membantu dalam pendekatan berkampanye dan menyampaikan program-program yang akan dilakukan ketika menjabat.

Kata Kunci: Politik Identitas, Gender, Pilkada, Strategi Politik

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri berdaulat dan berkomitmen memberi pengakuan yang sama untuk tiap warganya, baik perempuan ataupun laki-laki, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak politik untuk perempuan pula diatur secara formal dalam bermacam aturan hukum yang ada. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28H ayat (2) yang menyatakan Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan¹.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi hak politik bagi perempuan di Indonesia. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain adanya *stereotip* gender dan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Sebab itulah, diperlukan adanya usaha yang terus menerus untuk memperkuat dan memperjuangkan hak politik bagi perempuan di Indonesia².

Hak-hak diperlukan untuk keterwakilan perempuan dalam panggung politik serta lembaga politik resmi, meski representasi saat ini masih jauh dari persentase yang telah ditetapkan dibanding dengan laki-laki. Dari kuota partai politik sudah memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan yang bisa ikut berkompetisi dalam pemilu tetapi masih belum memenuhi kuota total 30% di parlemen. Dari 575 anggota legislatif periode 2019-2024 hanya

¹ Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi Ketua Badan Legislasi DPRRI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.

² Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1No. 1, (2018), hal. 70.

sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen³. Perihal ini jadi normal, sebab dunia politik dihubungkan dengan ranah politik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari pangkal budaya dimana kebanyakan warga masih kental dengan budaya patriarki.

Politik identitas diri dalam berdemokrasi terus bergulir sampai pada isu gender, agama, bahasa, tercantum ras serta etnis terus jadi bahan kajian dalam politik identitas diri itu sendiri. Telah banyak peristiwa dalam proses pemilihan kepala wilayah di Indonesia di saat-saat ini yang menggiring isu-isu tersebut selaku senjata utama dalam memenangkan medan kontestasi. Isu gender juga dibahas oleh *Women Research Institute* bahwa isu-isu yang berkaitan dengan penerimaan atas identitas sebagai perempuan dapat dihembuskan melalui berbagai pemberitaan yang bias gender, seksis, dan diskriminatif oleh media. Apalagi saat ini masih terdapat kecenderungan bahwa media di Indonesia masih menekankan pada tiga citra saat melakukan peliputan tentang kandidat perempuan. Ketiga citra yang dimaksud adalah citra fisik, citra popularitas, dan citra kontras (konflik yang melibatkan perempuan yang bersangkutan)⁴.

Bagi Jeffrey Week Politik identitas diri merupakan berkaitan dengan persamaan dengan beberapa orang serta apa yang membedakan seorang dengan yang lain. Komentar Jeffrey Week tersebut menekankan berartinya bukti diri untuk masing-masing orang ataupun untuk sesuatu kelompok ataupun komunitas. Oleh sebab itu politik identitas diri diklaim jadi satu kesatuan dari politik kebudayaan⁵.

Politik identitas merupakan konsep yang mengacu pada penandaan kegiatan politik yang didasarkan pada identitas seseorang, termasuk identitas ras dan gender. Konsep ini dijelaskan oleh beberapa teori, salah satunya adalah teori yang diungkapkan oleh Heyes. Menurut Heyes, politik identitas mencakup pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota kelompok sosial tertentu, termasuk identifikasi ras dan gender⁶. Dalam

³ Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019.

⁴ Women Research Institute. Wajah Muram Keterwakilan dalam Pilkada di Indonesia. Jakarta: WRI.

⁵ Yeni Sri Lestari, Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama, *Journal of Politics and Policy*, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 21

⁶ Achmad Junaedy Muchtar, Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hal. 9.

konteks politik, hal ini dapat berarti bahwa kelompok-kelompok tersebut mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil di dalam sistem politik.

Pemilihan kepala daerah di suatu wilayah seringkali menjadi topik yang diperbincangkan di tengah masyarakat. Dalam konteks politik identitas, isu-isu seperti agama, gender, etnis, budaya, dan lainnya dapat muncul dan memengaruhi dinamika politik di suatu wilayah. Isu-isu ini dapat digunakan untuk menunjang atau menjatuhkan lawan politik, tergantung pada pandangan politik dan preferensi pribadi masing-masing individu atau kelompok.

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dikatakan masih jauh dari yang diharapkan, Dari 575 anggota legislatif periode 2019-2024 hanya sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen.⁷ Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan pengaruh, budaya patriarki, perbandingan gender. Walaupun hingga saat ini senantiasa terdapat upaya buat membetulkan persolan tersebut. Dalam penelitian Pusat Riset Politik BRIN menjelaskan politisi perempuan harus memiliki basis organisasi yang dapat melakukan advokasi kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat untuk dapat memilihnya. Dengan kata lain, ketika sudah berhadapan dengan masyarakat, mesin elektoral harus bekerja dengan optimal agar isu-isu sentimen gender yang mungkin bisa saja muncul di tengah masyarakat dapat dialihkan kepada pembangunan citra baik kandidat perempuan⁸.

Menghubungkan akses dan partisipasi perempuan dalam lembaga eksekutif di wilayah dengan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku menggambarkan masalah penting karena berangkat dari kebijakan pemerintah daerah ini, perempuan memiliki kesempatan dan tantangan untuk menjadi kepala daerah. Peraturan tentang pengisian jabatan kepala daerah adalah contohnya.

Kota Makassar menjadi perhatian khusus karena pilkadinya diulang. Pilkada pertama kali diadakan pada tahun 2019, tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan kepala wilayah di Indonesia, kemenangan

⁷ Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019.

⁸ Pusat Riset Politik BRIN, Hambatan Perempuan Calon Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa: Masalah Struktural atau Kultural?. Setelah mengumumkan dan mendaftar di KPU Makassar, Fatmawati Rusdi menjadi wakil walikota perempuan pertama dan satu-satunya di putaran pilkada Makassar 2020. Pilkada Makassar 2020 mencatat sejarah baru dengan pemilihan wakil walikota langsung perempuan untuk pertama kalinya.

didapat melalui kotak kosong. Setelah mengumumkan dan mendaftar di KPU Makassar, Fatmawati Rusdi menjadi wakil walikota perempuan pertama dan satu-satunya di putaran pilkada Makassar 2020. Pilkada Makassar 2020 mencatat sejarah baru dengan pemilihan wakil walikota langsung perempuan untuk pertama kalinya⁹.

Sesudah pencalonan, Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi dinyatakan mengungguli 3 rivalnya. Fatma ialah satu-satunya ontestan perempuan di Pilkada kota Makassar serta membuat sejarah untuk kalangan perempuan dimana akan memimpin selama 5 tahun masa pemerintahan ke depannya.

Pilkada di Kota Makassar menggambarkan tentang bukti dari pengaruh gender lewat wujud Fatmawati Rusdi, selaku sosok wakil walikota perempuan pertama yang terpilih dalam pilkada Kota Makassar tahun 2020. Fatmawati Rusdi menggunakan komunikasi langsung¹⁰. Metode ini dinilai lebih efisien dibanding pencitraan lewat beberapa kanal sosial media. Sehingga secara garis besar, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai strategi yang digunakan sehingga bisa mencapai kemengan serta terpilih selaku Wakil Walikota Makassar.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melihat peran politik identitas gender yang digunakan Fatmawati Rusdi melalui penelitian dengan judul buat melaksanakan riset dengan judul Politik Identitas Gender dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Makassar.

Metode

Penelitian yang digunakan ialah penelitian *literatur review*. penelitian *literature review* atau tinjauan pustaka ialah salah satu jenis penelitian yang digunakan dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui kajian literatur atau bahan pustaka yang masih relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

Literatur review mengumpulkan dokumen serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian ditelaah secara intens sehingga bisa

⁹ Imam Wahyudi, Sejarah Baru Makassar, Fatma Wakil Wali Kota Perempuan Pertama, TribunMakassar.com, 4 Juli 2023, <https://makassar.tribunnews.com/2020/12/11/sejarah-baru-makassar-fatma-wakil-wali-kota-perempuan-pertama>

¹⁰ *Ibid*

menunjang serta menjadi sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data melalui studi literatur, seperti buku, jurnal, serta informasi elektronik.

Penelitian ini melakukan riset melalui studi literatur sesuai dengan fokus penelitian mengenai strategi yang digunakan Fatmawati Rusdi dalam pilkada tahun 2020 di Kota Makassar. Dengan menggunakan perspektif teori feminisme liberal, dasar asumsi yang digunakan milik Jhon Locke, teori ini digunakan untuk melihat mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dunia perpolitikan Indonesia¹¹.

Hasil dan Diskusi

1. Teori Feminisme Liberal

Pada abad ke-18, Mary Wollstonecraft menulis *A Vindication of the Right of Women* (1759-1799), dan pada abad ke-19 John Stuart Mill dalam bukunya *Subjection of Women* dan Harriet Taylor Mills dalam bukunya *Enfranchisement of Women*. Pada abad ke-20, Betty Friedan menulis tentang feminisme liberal dalam *The Feminine Mystique* dan *The Second Stage*. Manusia lebih rasional daripada hewan. Dua komponen rasionalitas tersebut: moralitas, yang berarti membuat keputusan secara mandiri, dan prudensi, yang berarti memenuhi kebutuhan diri sendiri¹².

Feminisme liberal tidak membedakan gender dan menekankan hak-hak individu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsep hak-hak individu didasarkan pada gagasan John Locke tentang HAM, yang menyatakan bahwa hak asasi setiap orang untuk hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Menurut feminisme liberal, perempuan harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki dan diperlakukan secara setara dalam semua aspek kehidupan mereka¹³.

Ketentuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah syarat biologis yang abadi dan tidak dapat diubah. Gender, di sisi lain, didefinisikan sebagai perbedaan tingkah laku yang dibangun secara sosial antara pria dan perempuan. Gender didefinisikan sebagai pemikiran dan kepercayaan masyarakat tentang bagaimana perempuan dan pria harus

¹¹ Maria E. Pandu, Skripsi: *Gender di Tanah Mandar (Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene)*, (Makassar: UNHAS, 2006), hal. 18.

¹² Association For Women in Small Business Assistance (ASPPUK), *Feminisme Liberal*, 4 Juli 2023, <https://asppuk.or.id/2012/04/feminisme-liberal/>

¹³ Op. cit, hal. 18

berperilaku dan berpikir. Gender mengacu pada gagasan, model, atau nilai yang mengacu pada sistem ikatan sosial yang membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan perbedaan biologis dan alam. Perbandingan ini kemudian dibekukan oleh masyarakat dan tampaknya tidak dapat lagi diperbaiki. Kemudian dikuatkan oleh nilai-nilai pandangan hidup, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan kata lain, gender adalah nilai yang sudah melekat dalam diri seseorang dan tampaknya tidak dapat diubah¹⁴.

Mayoritas Feminis Liberal percaya bahwa perempuan di dalam negeri hanya berfungsi sebagai warga negara, bukan sebagai pembentuk kebijakan. Oleh karena itu, terdapat ketidaksetaraan perempuan baik dalam politik maupun bernegara dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu, pemikiran Feminist Liberal mulai menentang kesetaraan ini, paling tidak berdampak pada peningkatan kesetaraan perempuan untuk melakukan aktivitas politik, seperti membuat kebijakan nasional. Naomi Wolf, feminisme kekuatan yang ialah pemecahan, adalah tokoh dalam aliran ini. Saat ini, perempuan tidak hanya memiliki kekuatan dalam hal pendidikan dan pemasukan, tetapi mereka juga harus terus menuntut hak-hak yang sama. Sekarang adalah saatnya bagi perempuan untuk berkehendak sendiri tanpa bergantung pada lelaki.

Kebebasan dan kesetaraan rasionalitas adalah dasar feminisme liberal. Konsep ini berpendapat bahwa karena perempuan adalah makhluk rasional dengan kemampuan yang sama dengan laki-laki, mereka harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kebijakan negara yang bias gender masih belum diterapkan, sehingga diperlukan upaya untuk memungkinkan perempuan memperoleh hak sipil dan ekonomi¹⁵.

Di Indonesia, tuntutan untuk memberikan kuota 30% bagi perempuan di parlemen, hal ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD¹⁶. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk

¹⁴ Yeni Huriani, *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan*, Lekkas, Bandung, 2021, hal. 20

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ignatius Mulyono, loc. Cit.

mengurangi kesenjangan gender di bidang politik dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi perempuan di Indonesia juga terus memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang lainnya, seperti sosial, ekonomi, dan personal.

Dengan menetapkan kuota 30% untuk perempuan dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%"¹⁷, perempuan memiliki kesempatan dan momentum yang tepat karena mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan bahwa undang-undang tersebut menetapkan kuota 30% untuk perempuan, jumlah tersebut seharusnya memenuhi kuota keterwakilan perempuan, bukan malah terlalu kecil, karena hingga saat ini belum penuh kuota tersebut.

2. Keterlibatan Perempuan dalam Aktivitas Politik

Secara universal, keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah dalam seluruh tingkatan pengambilan keputusan ditingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam birokrasi pemerintahan, partai politik, serta kehidupan perpolitik yang lain.

Mencermati tentang ruang politik yang telah terbuka dengan lebar untuk kalangan perempuan, hingga dapatlah dikatakan perempuan bisa menerapkan hak politiknya secara terbuka pula. Terdapatnya jaminan hak politik, memberikan kabar yang sangat positif untuk pergerakan politik kalangan perempuan. Dalam upaya merepresentasikan hak politik dalam keterwakilannya dalam pengambilan keputusan politik, hingga dapat dilihat bagaimanakah konteks perempuan serta perwakilan politik.

Para wakil perempuan bekerja dalam lingkungan di mana harapan tidak hanya sensitif terhadap perbandingan gender dan seks, tetapi juga terhadap ketidakleluasaan dalam berbagai arena politik, budaya, dan proses politik. Intervensi feminis dalam politik telah menghasilkan pencapaian ini. Interaksi-interaksi yang terjadi di dunia politik, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan.

¹⁷ Ignatius Mulyono, loc. Cit.

Politikus perempuan telah mengambil peran utama dalam wacana politik. Namun, untuk menggambarkan struktur masyarakat, baik kelembagaan maupun kultural, di mana perdebatan tentang perwakilan politik perempuan terlokalisir, dan untuk melacak kemajuan mereka melalui perputaran politik yang berulang. Dimulai dengan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak yang ditetapkan sejak lahir, dan karena mereka adalah manusia, hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dibatalkan oleh siapa pun. Konsekuensinya, hak tersebut tercantum dalam undang-undang Indonesia. Hak itu berupa hak erpolitik, hak kebebasan berpikir, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak dalam mengambil bagian dalam pemerintah.

Keterlibatan seorang wanita dalam pilkada terjadi diseluruh Indonesia salah satunya Kota Makassar diawali pilkada tahun 2020 dimana terpilih seseorang perempuan yang akan mengeban tugas selaku wakil walikota Makassar. Pencalonan perempuan jadi nomor 2 di Kota Makassar melalui partai politik merupakan salah satu strategi buat meresap suara perempuan dalam konstestasi pilkada.

Tabel 1: Perolehan Suara Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

No. Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara
1.	Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto – Hj. Fatmawati Rusdi	218.908
2.	Munafri Arifuddin, S.H – DR. Abd Rahman Bando, S.P, M. Si	184.094
3.	DR. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M. Si – dr. Fadli Ananda, Sp.OG, M. Kes	100.869
4.	Irman Yasin Limpo, S.H - Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid	25.817

Sumber: kpu.go.id, 2020

Kesuksesan calon kepala wilayah perempuan jadi kepala wilayah maupun wakil kepala wilayah dalam pilkada serentak bisa dilihat calon perempuan yang dicalonkan tidak hanya perempuan, tetapi perempuan yang memiliki keahlian serta kecerdasan dalam strategi politik, modal sosial, modal ekonomi, hingga pada komunikasi politik dengan masyarakat warga di wilayah pemilihan¹⁸.

¹⁸ Tawakkal Baharuddin, Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, Journal of Governance and Public Policy, Vol. 4 No. 1 (2017), hal. 208.

3. Strategi Komunikasi politik yang digunakan dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Kamus *Longman Dictionary of Contemporary English*, arti dari *strategi* adalah *strategy is a particular plan for winning success in particular activity, as in war, a games, a competition, or for personal advantage*.¹⁹Jadi, strategi ialah perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam seluruh kegiatan. Baik dalam mensukseskan pencalonan, persaingan ataupun yang lain. Selanjutnya bersamaan dengan pertumbuhan kemajuan ilmu pengetahuan.

Strategi politik dapat diartikan sebagai cara bagi partai dan calon kepala wilayah untuk bekerja sama untuk membuat strategi untuk mencapai tujuannya. Fatmawati Rusdi dan koalisinya menggunakan keterlibatan pemilih perempuan sebagai strategi kampanye untuk mendapatkan suara untuk memilihnya sebagai wakil walikota Makassar. Politik identitas gender dalam konteks strategi, menjelaskan perempuan menggunakan strategi dalam mencapai kemenangan pada sebuah kontestasi politik. Fatmawati Rusdi mempunyai keahlian yang sangat baik dalam melaksanakan pendekatan teruji dengan strategi yang digunakan ialah menggunakan strategi komunikasi langsung (*door to door*)²⁰, terlebih suara pemilih perempuan di Kota Makassar lebih banyak dibandingkan pria. Jumlah tersebut bisa dilihat dari penetapan DPT oleh KPU sebanyak 954.437 jiwa dengan bersumber pada pemilih pria sebanyak 465. 009 orang serta pemilih perempuan sebanyak 489. 428 jiwa²¹.

Fatmawati Rusdi pula melaksanakan pendekatan dengan ibu-ibu majelis taklim di lorong-lorong, paguyuban berolahraga perempuan salah satunya kerap bersepeda jadi media buat berbicara langsung dengan warga serta perihal ini sangat membatu dalam pendekatan berkampanye serta mengantarkan program-program yang hendak dicoba Kala berprofesi²². Bimbingan tentang kesetaraan gender sangat dibutuhkan oleh warga. Masih banyak warga belum memahami tentang kesetaraan

¹⁹ Harold Y. Pattiasina, Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu 2014, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 19 No. 1 (2015), hal. 20.

²⁰ Hamsah Umar, Pakar Komunikasi Ungkap Strategi Fatma Memenangkan Pilkada Makassar, Fajar.co.id, <https://fajar.co.id/2020/12/17/pakar-komunikasi-ungkap-strategi-fatma-menangkan-pilkada-makassar/>.

²¹ KPU, DPT Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, <https://kota-makassar.kpu.go.id/>

²² Kamsah Hasan, Cara Fatmawati Rusdi Rawat Silaturahmi Usai Kampanye, makassarterkini.id, <https://makassar.terkini.id/cara-fatmawati-rusdi-rawat-silaturahmi-dengan-warga-usai-kampanye/>

gender, sehingga dari itu bimbingan yang diberikan sangat bermanfaat ini bagi warga. Tingginya partisipasi pemilih perempuan dalam mendukung Fatmawi Rusdi, hal ini disebabkan oleh tercipta Komunitas Janda Makassar (Kojam) sukarelawan perempuan milenial yang bertujuan untuk mendukung kemenangan Danny-Fatma.

Kesimpulan

Keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum telah meningkat hampir di seluruh Indonesia, terutama di Kota Makassar, di mana pemilihan wakil walikota perempuan dipilih pada tahun 2020. Kesuksesan calon kepala daerah perempuan dalam pilkada serentak ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka dicalonkan bukan hanya perempuan, mereka juga memiliki pengetahuan dan keahlian dalam strategi politik, modal sosial, dan ekonomi, serta komunikasi politik dengan komunitas warga di wilayah pemilihan mereka. Dengan menggunakan strategi komunikasi langsung (*door-to-door*), Fatmawati Rusdi telah menerapkan pendekatan yang tepat. Selain itu, ada lebih banyak suara perempuan di Kota Makassar dibandingkan suara laki-laki. Melihat strategi Fatmawati Rusdi berhasil, ibu-ibu majelis taklim di lorong-lorong mendukungnya, dan komunitas olahraga perempuan, salah satunya yang sering bersepeda, menggunakan olahraga sebagai media untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Ini sangat membantu dalam pendekatan berkampanye dan menyampaikan program-program yang akan dia laksanakan selama menjabat.

Daftar Pustaka

- Ahmed Leila. *Perempuan dan Gender dalam Islam (Akar-akar Perdebatan Modern)*. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Abdillah S., Ubed. *Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002.
- Baharuddin, Tawakkal. 2017. Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4 No. 1.
- Huriani, Yeni. *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan*. Bandung: Lekkas, 2021.
- Kadir, A & Safriani, A. 2021. Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 3 (1): 29.
- Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. The Pitman Press, Bath, Great Britain, 1982.

- Lestari, S Yeni. 2018. Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, Vol. 1 No. 1.
- Wahyudi, Very. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1 (1): 70.
- Women Research Institute. (n.d). *Wajah Muram Keterwakilan dalam Pilkada di Indonesia*. Jakarta: WRI.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Muchtar, J Achmad. 2021. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Pandu E, Maria. 2006. Gender di Tanah Mandar (Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene). *Skripsi*. Makassar: Unhas.
- Pattiasina Y, Harold. 2015. Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 19 No. 1.
- Ritzer George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sastrawati. Nila. 2017. Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6 (2): 284.
- Udasmoro, Wening. *Doing ke Undoing Gender*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Utami, Santi Wijaya Hesti, dkk. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi Ke Pemberdayaan*. Bantul: IP4 Lappera Indonesia, 2001.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.